REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN
CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	:	EC00201931616, 4 Maret 2019
Pencipta		
Nama	:	**Prof. Dr(Eng). Vincent Gaspersz, IPU, AER**
Alamat	:	[redacted]
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pemegang Hak Cipta		
Nama	:	**Prof. Dr(Eng). Vincent Gaspersz, IPU, AER**
Alamat	:	[redacted]
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis Ciptaan	:	**Makalah**
Judul Ciptaan	:	**Desain Dan Implementasi Model Strategik Pembangunan Ekonomi Berbasis Koperasi Yang Memiliki Skala Usaha Ekonomis (Economies Of Scale) Dan Ruang Lingkup Ekonomis (Economies Of Scope)**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	:	7 September 2017, di Bogor
Jangka waktu pelindungan	:	Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	:	000136464

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Desain dan Implementasi Model Strategik Pembangunan Ekonomi Berbasis Koperasi Yang Memiliki Skala Usaha Ekonomis (Economies of Scale) dan Ruang Lingkup Ekonomis (Economies of Scope)

Makalah

(Makalah ini telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. Registrasi: 000136464)

Oleh: Prof. Dr(Eng). Vincent Gaspersz, IPU, AER

Lean Six Sigma Master Black Belt & Certified Management Systems Lead Specialist

- Guru Besar (Professor) Total Quality and Operations Management
- Doktor Teknik Sistem dan Manajemen Industri, Institut Teknologi Bandung (ITB)
- APICS (www.apics.org) Certified in Production and Inventory Management (CPIM), Certified in Production and InventoryManagement Fellow (CPIM-F), Certified Supply Chain Professional (CSCP), Certified Supply Chain Professional Fellow (CSCP-F),
- International Quality Federation (www.iqf.org) Six Sigma Master Black Belt (SSMBB),
- American Society for Quality (www.asq.org) Certified Six Sigma Black Belt CSSBB), Certified Quality Engineer (CQE), Certified QualityAuditor (CQA), Certified Manager of Quality/Organizational Excellence (CMQ/OE), Certified Quality Improvement Associate (CQIA)
- Registration Accreditation Board (www.exemplarglobal.org) Certified Management Systems Lead Specialist (CMSLS)
- Insinyur Profesional Utama (IPU) – Badan Kejuruan Teknik Industri- Persatuan Insinyur Indonesia (BKTI – PII)
- Asean Engineer Register (AER No. 10084), Asean Federation of Engineering Organizations (AFEO)
- Senior Member of the American Society for Quality (Member #: 00749775), International Member of the American Production and Inventory Control Society (Member #: 1023620), and Senior Member of the Institute of Industrial and Systems Engineers (Member #: 880194630).

Bogor, Indonesia

7 September 2017

Desain dan Implementasi Model Strategik Pembangunan Ekonomi Berbasis Koperasi Yang Memiliki Skala Usaha Ekonomis (Economies of Scale) dan Ruang Lingkup Ekonomis (Economies of Scope)

Oleh: Prof. Dr(Eng). Vincent Gaspersz, IPU, AER
Lean Six Sigma Master Black Belt & Certified Management Systems Lead Specialist

Makalah ini akan membahas secara garis besar tentang: (1) Terminologi dan Definisi, (2) Keberhasilan Pembangunan Ekonomi Melalui Koperasi (Pembelajaran dari Korea Selatan), (3) Koperasi Pertanian (NACF) di Korea Selatan dan Gerakan Masyarakat Baru Korea Selatan (Saemaul), (4) Strategi Membangun Perekonomian NTT Melalui Koperasi-koperasi Yang Mencapai Skala Usaha Ekonomis (Economies of Scale) dan Ruang Lingkup Ekonomis (Economies of Scope), (5) Sekilas Tentang Kinerja Koperasi dan Industri di DI Yogyakarta, dan (6) Kesimpulan dan Rekomendasi Manajemen.

I. Terminologi dan Definisi

- Pembangunan ekonomi adalah proses di mana suatu bangsa meningkatkan ekonomi, politik, dan kesejahteraan social rakyatnya. Istilah ini telah digunakan oleh ekonom, politisi, dan lainnya selama ini. Modernisasi, terutama industrialisasi adalah istilah-istilah lain yang telah digunakan banyak orang ketika mendiskusikan pembangunan ekonomi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi (economic growth) mencakup usaha intervensi kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja dan peningkatan produk domestik bruto (PDB). Dengan demikian kita dapat menyatakan dalam sistem ekonomi, bahwa pembangunan ekonomi yang merupakan proses dari sistem ekonomi itu akan menghasilkan output

berupa pertumbuhan ekonomi (peningkatan produktivitas tenaga kerja dan peningkatan produk domestik bruto).

- Koperasi (Cooperative) adalah usaha bersama yang dimiliki dan dijalankan secara bersama oleh anggota-anggotanya yang membagi keuntungan atau manfaat. Charles E. Snyder (President and CEO National Cooperative Bank, 2016) menyatakan bahwa koperasi yang berkualitas dan kompetitif harus memenuhi tujuh persyaratan berikut: (1) Bersifat sukarela dan keanggotaan terbuka, (2) Pengendalian oleh anggota-anggota secara demokratis, (3) Partisipasi ekonomi aktif oleh anggota-anggota, (4) Otonomi dan bebas, (5) Memiliki pendidikan, pelatihan dan informasi, (6) Memiliki kerjasama di antara unit-unit koperasi, dan (7) Mempunyai perhatian pada masyarakat.
- Skala Usaha Ekonomis (Economies of Scale) adalah keunggulan biaya (cost advantages) yang diperoleh satu unit usaha, karena usaha itu beroperasi pada skala output yang memungkinkan dicapainya penurunan biaya per unit output (biaya rata-rata) mencapai minimum. Hal ini disebabkan biaya tetap (fixed costs) akan terdistribusi secara merata sepanjang skala usaha ekonomis itu, sehingga Long Run Average Cost (LRAC) akan minimum. Skala usaha ekonomis ini ada dalam dunia nyata, sehingga setiap unit usaha harus berupaya mendekati atau mencapai skala usaha ekonomis (economies of scale) ini seperti ditunjukan dalam Bagan 1.

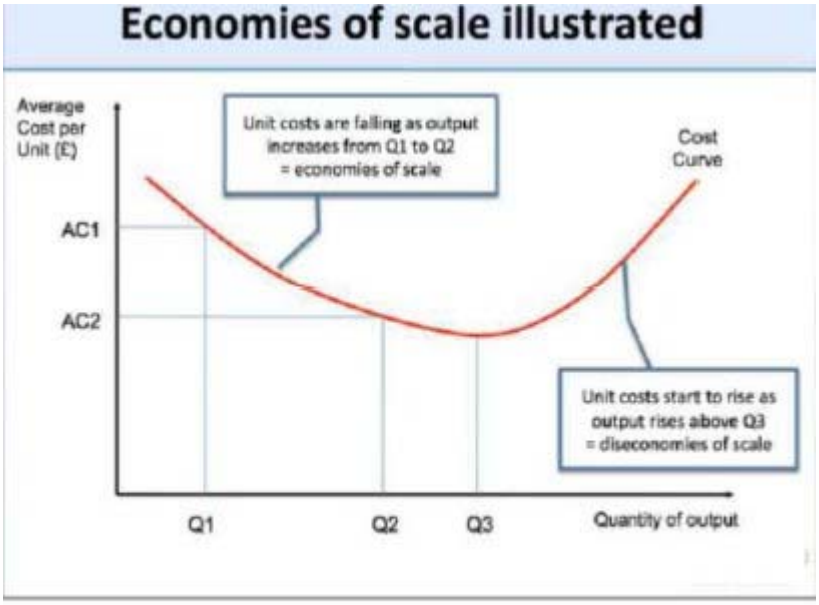

Bagan 1. Skala Usaha Ekonomis (Economies of Scale)

- Ruang Lingkup Ekonomis (Economies of Scope) adalah efisiensi yang tercapai karena proses diversifikasi usaha yang muncul ketika bisnis itu saling memadukan atau mengintegrasikan fungsi-fungsi terkait (misalkan fungsi keuangan atau pemasaran dipadukan menjadi satu) atau ketika unit-unit bisnis saling berintegrasi satu sama lain (misalkan output dari satu unit bisnis menjadi input bagi unit bisnis lain dalam keterkaitan proses bisnis, misal: usaha peternakan sapi potong diintegrasikan dengan usaha pengolahan daging sapi menjadi produk daging beku atau lainnya). Proses konglomerasi dalam unit-unit bisnis adalah berupaya mencapai Ruang Lingkup Ekonomis (Economies of Scope). Penjualan Silang (Cross Selling) berbagai produk sekaligus juga merupakan upaya mencapai Ruang Lingkup Ekonomis (Economies of Scope), karena penjualan berbagai jenis produk akan lebih menguntungkan dibandingkan penjualan hanya satu produk saja. Ruang Lingkup Ekonomis (Economies of Scope) juga dapat beroperasi melalui efisiensi distribusi, misalnya kapal pengangkut

akan fleksibel dan efisien ketika mengangkut berbagai jenis produk untuk diangkut ke berbagai lokasi dibandingkan hanya mengangkut satu jenis produk ke satu lokasi saja. Contoh Ruang Lingkup Ekonomis (Economies of Scope) ditunjukan dalam Bagan 2.

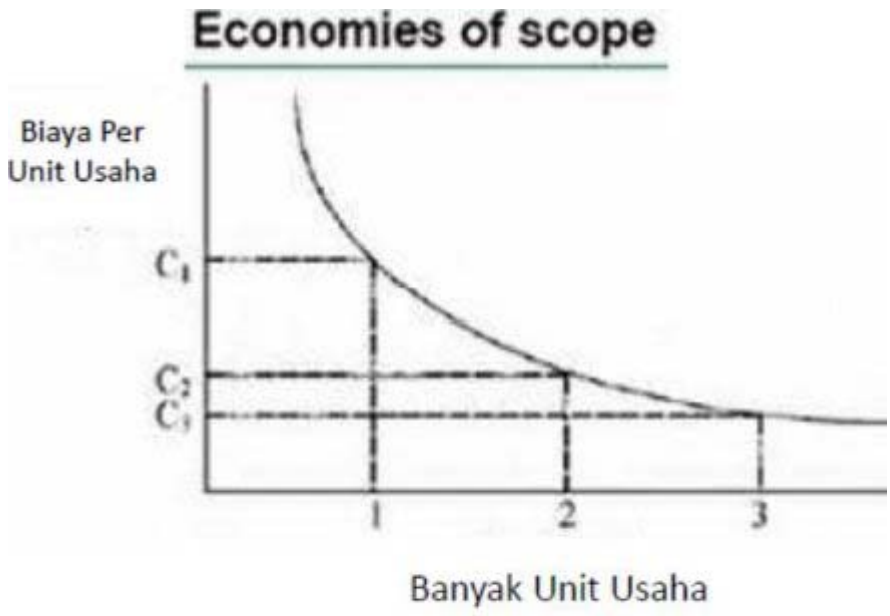

Bagan 2. Ruang Lingkup Ekonomis (Economies of Scope)

II. Keberhasilan Pembangunan Ekonomi Melalui Koperasi (Pembelajaran dari Korea Selatan)

Korea Selatan merdeka pada tanggal 15 Agustus 1945 (meskipun baru mulai dirayakan pada 15 Agustus 1948) sedangkan Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Mengapa Indonesia harus dibandingkan dengan Korea Selatan, yang tingkat kemajuannya telah jauh melampaui Indonesia? Karena kedua negara ini memulai pembangunan secara bersamaan dan merdeka juga dalam waktu yang hamper bersamaan. Kedua negara ini, Indonesia dan Korea Selatan adalah negara-negara yang jumlah penduduknya miskin ketika memulai pembangunan ekonomi dan industri (perbedaan pada Indonesia kaya akan sumber daya alam vs. Korea

Selatan miskin akan sumber daya alam). Namun kedua negara ini berbeda seperti bumi dengan langit pada tahun 2017 ini.

Korea Selatan pada tahun 1960 merupakan negara miskin (pendapatan per kapita USD 79) dengan tanpa sumber daya alam yang memadai, namun melalui penerapan strategi industrialisasi berorientasi ekspor yang ditunjang oleh fokus pembangunan pada sumber daya manusia dalam wadah koperasi secara intensif dan meluas sehingga mampu meningkatkan produktivitas sumber daya manusia nasional Korea Selatan secara dramatis, sehingga telah membawa Korea Selatan pada tahun 2016 telah berpendapatan per kapita USD 25.458,90 (https://tradingeconomics.com/south-korea/gdp-per-capita), naik sekitar 322 kali dalam 56 tahun.

Sedangkan Indonesia yang memiliki sumber daya alam berlimpah pada tahun 2016 hanya berpendapatan per kapita USD 3.974,10 (https://tradingeconomics.com/indonesia/gdp-per-capita).

Pada tahun 1960-an, Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan memulai pembangunan dengan status sama-sama menjadi negara miskin. Perbedaan pada Indonesia kaya sumber daya alam, Malaysia cukup sumber daya alam, dan Korea Selatan miskin sumber daya alam. Namun dalam pembangunan karena faktor pertumbuhan produktivitas sumber daya manusia yang luar biasa telah membawa Korea Selatan menjadi negara berpendapatan tinggi, sedangkan Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah. Analisis oleh Vincent Gaspersz (2014) menunjukkan bahwa faktor yang membawa kesejahteraan masyarakat suatu negara tergantung pada peningkatan produktivitas sumber daya manusia, BUKAN kepemilikan sumber daya alam. Produktivitas sumber daya manusia Korea Selatan (tertinggi), Malaysia (sedang), dan Indonesia (rendah) selama periode pembangunan ekonomi tahun 1967-2012 ditunjukan dalam Bagan 3.

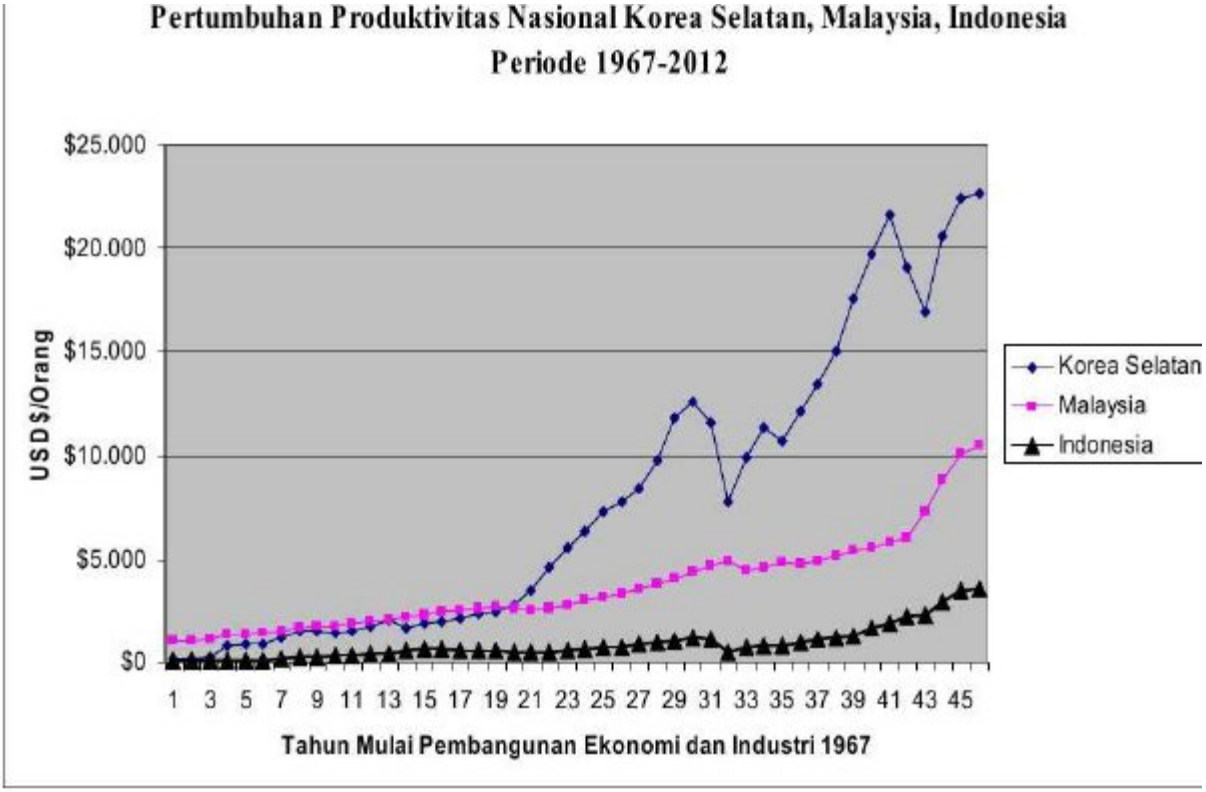

Sumber: Vincent Gaspersz, 2014 (Dok.Pribadi)—Diolah dari Berbagai Laporan Bank Dunia

Bagan 3. Pertumbuhan Produktivitas Nasional Korea Selatan, Malaysia, dan Indonesia Periode Pembangunan Ekonomi 1967-2012

Bank Dunia mengklasifikasikan negara-negara di dunia sebagai berikut:

- Negara berpendapatan rendah memiliki pendapatan per kapita US$975 atau kurang;
- Negara berpendapatan menengah bawah memiliki pendapatan per kapita dari US$976 sampai US$3.855.
- Negara berpendapatan menengah atas memiliki pendapatan per kapita dari US$3.856 sampai US$11.905.
- Negara berpendapatan tinggi memiliki pendapatan per kapita lebih dari US$11.906.

Indonesia yang memiliki sumber daya alam berlimpah pada tahun 2012 hanya menghasilkan Produksi Nasional (Produk Nasional Bruto = *GNP/Gross National Product*) sebesar USD 844 Milyar, sedangkan Korea Selatan yang miskin sumber daya alam mampu

menghasilkan Produksi Nasional (Produk Nasional Bruto = GNP) USD 1,133 Milyar (USD 1,13 Trilyun) atau sekitar 1,34 kali dari GNP Indonesia.

Persentase penduduk miskin di Korea Selatan yang berpenghasilan <= USD 2,5/hari = 0%, demikian pula persentase penduduk miskin berpendapatan USD10/hari adalah nol persen.

Melihat lebih jauh tentang pembangunan kesehatan di Korea Selatan, berdasarkan data Bank Dunia (2014), tingkat kematian bayi (di bawah lima tahun) di Korea Selatan adalah 5/1000 kelahiran, sedangkan di Indonesia adalah 32/1000 kelahiran. Angka kematian ibu melahirkan, di Korea Selatan: 16/100.000, sedangkan di Indonesia 220/100.000. Umur harapan hidup di Korea Selatan 81 tahun, sedangkan di Indonesia 71 tahun.

Bagaimana dengan pembangunan pendidikan di Korea Selatan vs. Indonesia? Data Bank Dunia (2014) menunjukkan persentase penduduk yang memperoleh pendidikan tinggi di Korea Selatan 17,9% sedangkan Indonesia hanya 1,17%.Persentase penduduk berpendidikan menengah di Korea Selatan 36,8% sedangkan di Indonesia hanya 11,1%.

Tentang tingkat tabungan penduduk di Korea Selatan vs. Indonesia adalah: persentase jumlah penduduk yang menabung di Korea Selatan adalah 46,9%; sedangkan di Indonesia hanya 15,3%.

Lebih jauh jika dikaji angka indeks *Worldwide Governance Indicators Average (WGIA)* di Korea Selatan sebesar +0,76 (positif) sedangkan di Indonesia -0,46 (minus).Bank Dunia menyusun WGIA berdasarkan enam indikator kunci yang menghasilkan angka indeks dari minus 2,5 (terburuk) sampai positif 2,5 (terbaik). Keenam indikator kunci itu adalah: (1) Demokrasi dan Akuntabilitas, (2) Kestabilan Politik dan Ketiadaan Kekerasan, (3) Efektivitas Pemerintahan, (4) Kualitas Peraturan, (5) Penegakan Hukum, dan (6) Pengendalian Korupsi.

Berdasarkan data Bank Dunia (2014) diketahui bahwa indeks WGIA dari Indonesia sebesar -0,46 (minus 0,46) adalah hampir sama dengan Negara-negara Filipina (-0,49), Mali (-0,49), Boznia & Herzegovina (-0,43), dan Tanzania (-0.36).

Negara-negara yang memiliki WGIA Index terburuk adalah: Somalia (-2,30), Afghanistan (-1,75), Sudan (-1,60), Zimbabwe (-1,47), dan Irak (-1,34). Sedangkan Negara-negara yang memiliki WGIA Index terbaik adalah: Denmark (+1,86), Finlandia (+1,85), New Zealand (+1,83), Sweden (+1,80), Switzerland (+1,71), Belanda (+1,71),Norwegia (+1,70), Australia (+1,63), Canada (+1,62), Singapore (+1,47), dan Jerman (+1,42).

Mengapa Korea Selatan bisa maju sangat pesat dibandingkan Indonesia? Ternyata strategi pembangunan ekonomi melalui koperasi yang memiliki skala usaha ekonomis (economies of scale) dan ruang lingkup ekonomis (economies of scope) beserta program Gerakan Masyarakat Baru berikut yang memajukan Korea Selatan.

III.1 Koperasi Pertanian (NACF) di Korea Selatan

Korea Selatan memulai pembangunan melalui melakukan *Land Reform* secara besar-besaran, kemudian mendirikan koperasi pertanian (*National Agricultural Cooperative Federation*) pada 15 Agustus 1961. Jika kita mendengar kata koperasi di Korea Selatan, jangan membayangkan seperti koperasi di Indonesia yang juga selalu menghadapi masalah *mis-management* dan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap koperasi, karena koperasi masih diperlakukan sebagai usaha kecil menengah (UKM).

Jumlah koperasi di Korea Selatan pada Februari 2012 memiliki 1.167 cabang utama beserta 3.306 unit koperasi. Jumlah Koperasi Regional (968 buah); Koperasi Komoditas Pertanian untuk buah-buahan (25 buah), sayur-sayuran (17 buah), hortikultura (3 buah); Koperasi Peternakan Regional (118 buah); Koperasi Susu (13 buah), Koperasi Babi (7 buah),

Koperasi Unggas (2 buah), Koperasi Pemeliharaan Lebah (1 buah), Koperasi Kelinci dan Rusa (1 buah); dan Koperasi Komoditas Ginseng (12 buah).

Koperasi Pertanian (NACF) Korea Selatan memiliki lini bisnis: perbankan dan asuransi, pemasok dan pemasaran pertanian, pemasok dan pemasaran peternakan, jasa-jasa pelayanan, yang memiliki anggota pada tahun 2011 sebanyak 2,446,836 orang petani dan associate members sebanyak 15,262,611 orang.

Selanjutnya koperasi-koperasi di Korea Selatan jangan dibayangkan seperti Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia, karena omzet penjualan dari koperasi-koperasi itu melebihi konglomerat-konglomerat di Indonesia. Sebagai perbandingan pada tahun 2014, omzet dari NACF adalah USD 63.76 Milyar atau setara dengan +/- Rp. 848 Trilyun, termasuk nomor 1 di dunia untuk koperasi dalam sektor pertanian dan industri makanan.

Bandingkan dengan omzet penjualan dari perusahaan konglomerat Korea Selatan Samsung & LG Electronics pada 2014 adalah berturut-turut sekitar USD 195,88 Milyar (+/- Rp. 2.605 Trilyun) dan USD 55,91 Milyar (+/-Rp. 744 Trilyun). Hal ini berarti penjualan dari Koperasi Pertanian Korea Selatan pada tahun 2014 adalah sekitar 114 persen daripada penjualan LG Electronics atau sekitar 32,6 persen daripada penjualan Samsung pada tahun 2014.

Jika kita melihat cadangan devisa Indonesia per Desember 2014 yang hanya sekitar USD 100,7 Milyar (+/- Rp. 1.339 Trilyun) dan total ekspormigas dan non-migas Indonesia pada tahun 2014 yang hanya sekitar USD 176,29 Milyar (+/- Rp. 2.345 Trilyun), maka tampak bahwa total ekspor Indonesia pada tahun 2014 lebih rendah (hanya sekitar 70 persen) daripada penjualan dua perusahaan raksasa Korea Selatan (Samsung & LG) yang mencapai sekitar USD 251,79 Milyar (+/- Rp. 3.349 Trilyun). Atau jika dibandingkan dengan penjualan dari Koperasi Pertanian Korea Selatan pada tahun 2014 yang sekitar USD 63,78 Milyar (+/- Rp. 848 Triliun),

maka penjualan dari koperasi pertanian Korea Selatan adalah sama dengan 36,2 persen dari total ekspor migas dan non migas Indonesia pada tahun 2014.

Daftar 20 koperasi top di dunia dalam sector pertanian dan industri makanan tahun 2014 ditunjukkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. 20 Koperasi Terbesar Dunia dalam Sektor Pertanian dan Industri Makanan Tahun 2014

Rank 2014	Rank 2013	Nama Koperasi	Negara	Sales ($US Milyar)	% Sales	Sales (Rp. Triliun)	Posisi TOP20 (Sales/GDP Per kapita)
1	1	NH Nonghyup	Korea Selatan	63,76	17,90%	848,01	1
2	2	Zen-Noh	Jepang	47,69	13,39%	634,28	3
3	3	CHS Inc.	USA	42,66	11,98%	567,38	5
4	4	Bai Wa	Jerman	20,16	5,66%	268,13	6
5	10	Dairy Farmers of America	USA	17,92	5,03%	238,34	9
6	6	Fonterra	New Zealand	15,56	4,37%	206,95	8
7	5	Frieslandcampina	Belanda	15,14	4,25%	201,36	11
8	8	Land O'Lakes, Inc.	USA	14,97	4,20%	199,10	12
9	9	Arla foods	Denmark	13,95	3,92%	185,54	13
10	7	Hokuren	Jepang	13,88	3,90%	184,60	7
11	13	Danish Crown	Denmark	10,61	2,98%	141,11	18
12	11	DLG	Denmark	10,46	2,94%	139,12	19
13	15	Growmark, Inc	USA	10,37	2,91%	137,92	16
14	12	Suedzucker	Jerman	9,99	2,80%	132,87	14
15	-	Copersucar	Brazil	9,77	2,74%	129,94	4
16	14	Agravis	Jerman	9,77	2,74%	129,94	15
17	18	Kerry Group	Irlandia	7,63	2,14%	101,48	-
18	17	In Vivo	Perancis	7,52	2,11%	100,02	17
19	-	Sodiaal Union	Perancis	7,20	2,02%	95,76	20
20	19	DMK Deutsches Milchkontor	Jerman	7,20	2,02%	95,76	-
			TOTAL	356,21	100,00%	4.737,59	-

Kurs $US 1 = Rp. 13.300

Sumber: Vincent Gaspersz, 2017 (Dok. Pribadi), Analisis dari World Co-Operative Monitor Report, 2016, www.monitor.coop

Perhatian pemerintah pada koperasi-koperasi di Korea Selatan sangat besar, karena koperasi-koperasi itu yang memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat Korea Selatan. Hubungan antara Presiden, Menteri Pertanian dan Perikanan, serta Koperasi Pertanian di Korea Selatan sangat jelas dan terstruktur mulai dari pusat perkotaan sampai ke desa-desa. Pemerintah Korea Selatan TIDAK MENGATUR koperasi-koperasi di Korea Selatan, manajemen dilakukan secara profesional dan digerakkan sebagai unit bisnis mandiri seperti ditunjukkan dalam Bagan 2. Jika sistem pemasaran pertanian di Indonesia masih mempertahankan sistem tradisional dengan rantai pemasaran yang panjang, yaitu: Petani (Produsen) – Pedagang Pengumpul (Tengkulak) – Pengirim (Tengkulak) – Pedagang Besar – Pedagang Eceran – Konsumen; maka di Korea

Selatan melalui koperasi-koperasi pertanian telah memperpendek rantai pemasaran yaitu: Petani (Koperasi Petani Produsen) – *Agriculture Proccesing Centers* (Koperasi-koperasi pertanian) – *Agriculture Marketing Complexes* (Supermarket yang dimiliki Koperasi Pertanian) – Konsumen.

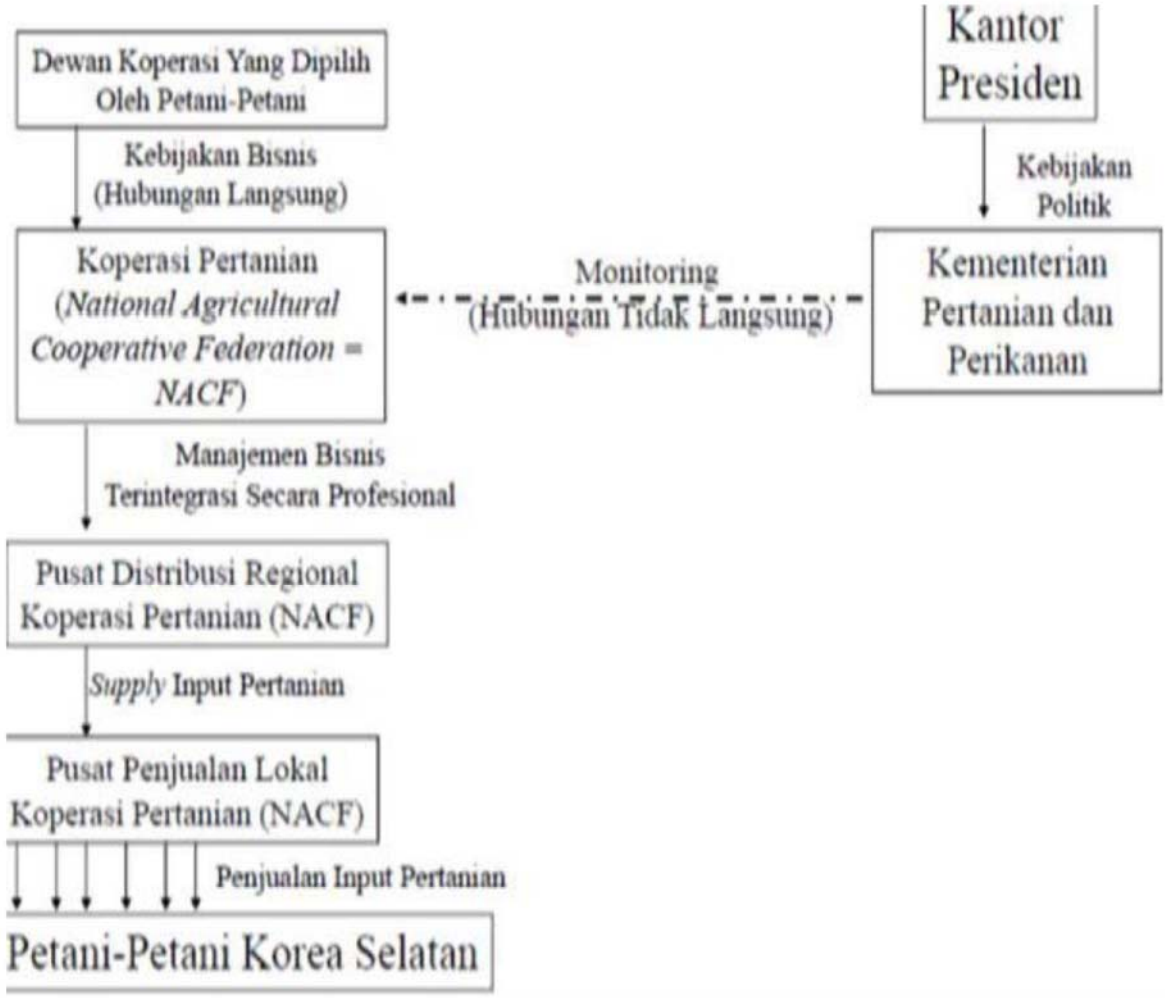

Bagan 4 Struktur Hubungan antara Presiden, Menteri Pertanian dan Perikanan, serta Koperasi Pertanian di Korea Selatan

Peranan Koperasi Pertanian untuk memajukan perekonomian Korea Selatan ditunjukan dalam Bagan 5, sedangkan contoh integrasi koperasi peternakan dengan koperasi pertanian (induk) ditunjukan dalam Bagan 6.

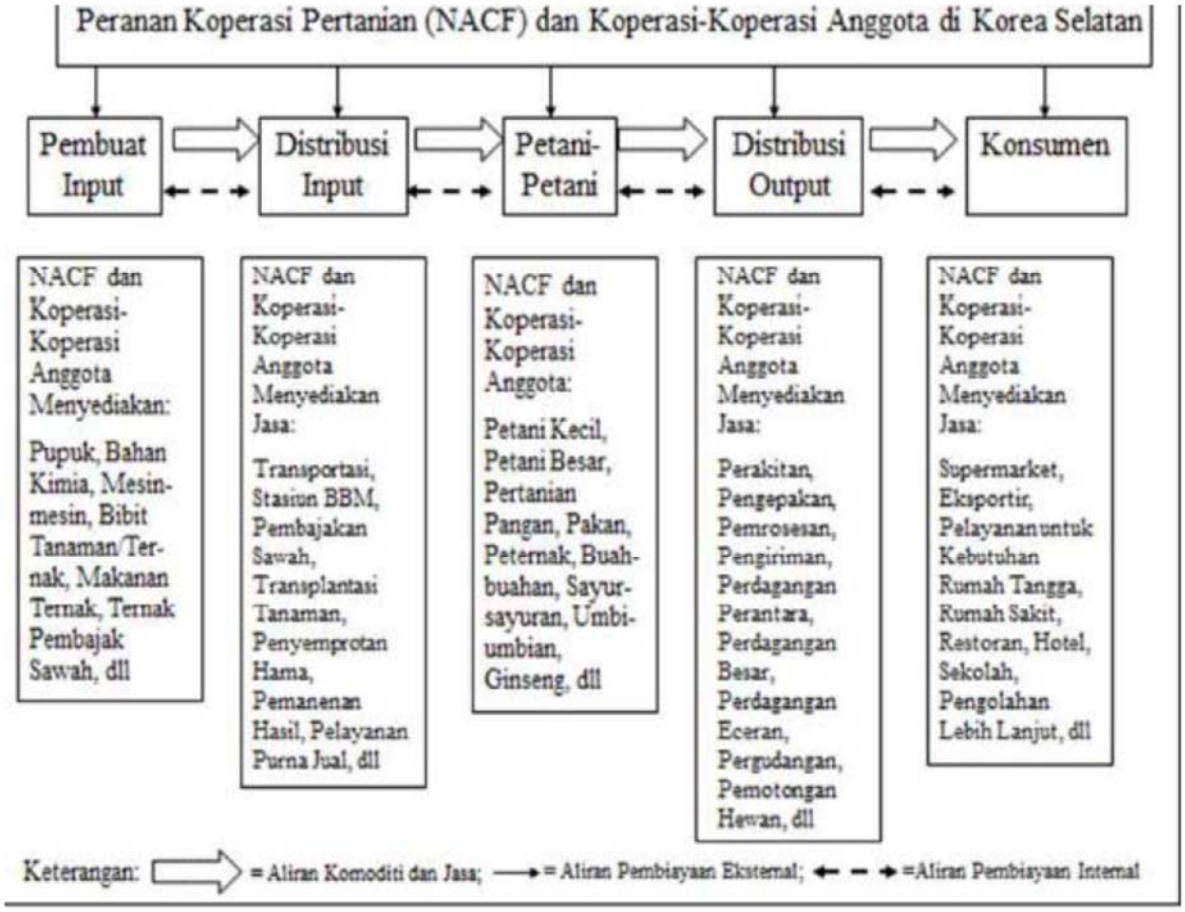

Bagar 5 Peranan Koperasi Pertanian (NACF) dan Koperasi-koperasi Anggota di Korea Selatan

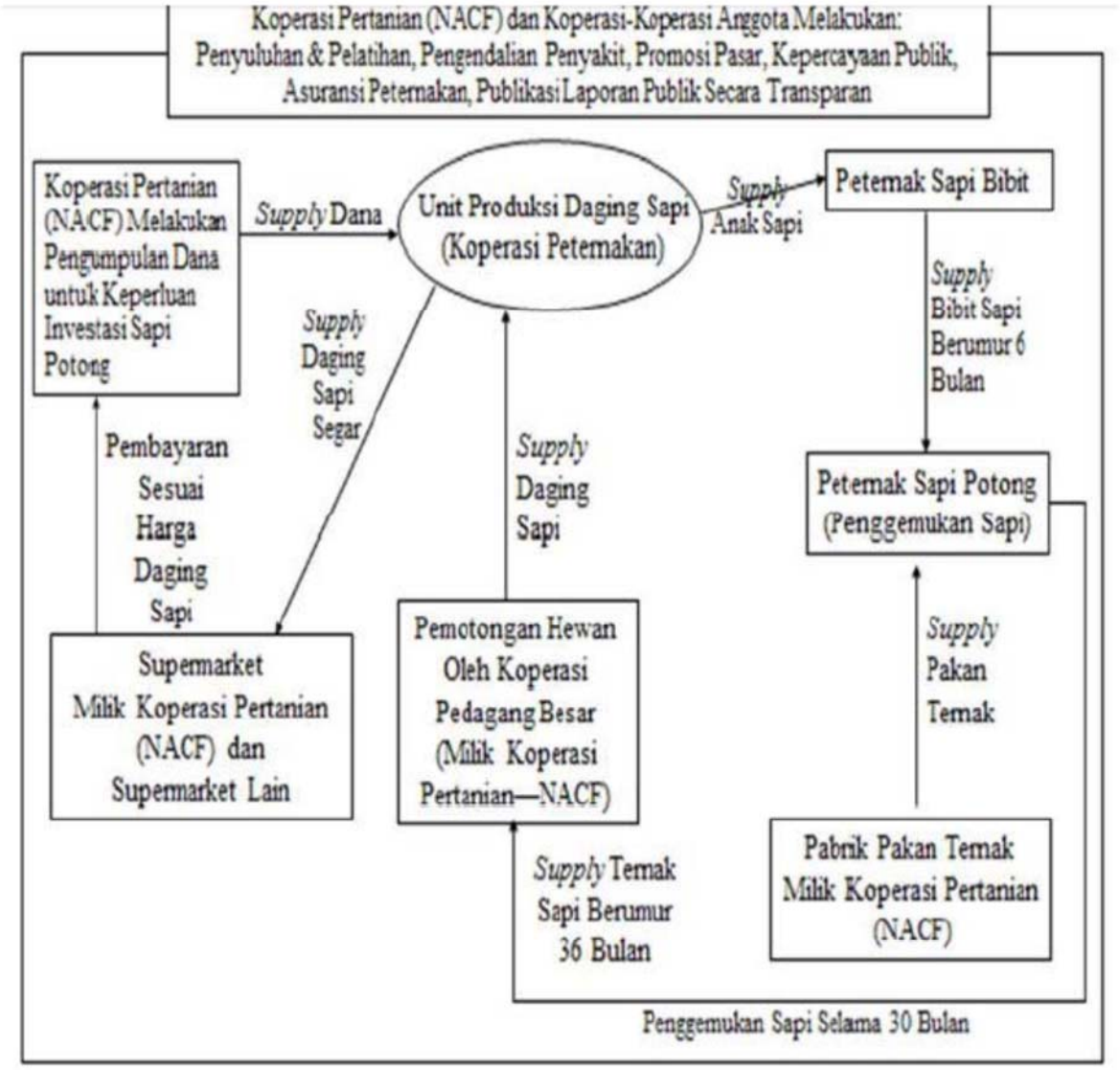

Bagan 6 Contoh Keterkaitan Unit-unit Koperasi Peternakan untuk Mencapai Ruang Lingkup Ekonomis (Economies of Scope) di Korea Selatan

Berbagai fasilitas yang dimiliki oleh Koperasi Pertanian di Korea Selatan pada tahun 2011 ditunjukan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Berbagai Fasilitas Koperasi Pertanian (NACF) Korea Selatan yang Dimiliki pada Tahun 2011
(Sumber: Koh Young-Kon, 2013)

Fasilitas Dalam Proses Agricultural Supply Chain	Total (Unit)	Milik NACF	Milik Koperasi Anggota	Fungsi Utama
Pusat Pengepakan Hasil-hasil Pertanian	270	—	270	Pengumpulan, Pembersihan, Penyimpanan, Pendinginan, dan Pengepakan Hasil-hasil Pertanian
Kompleks Pemrosesan Beras	168	—	168	Pengeringan, Penyimpanan, Penggilingan, dan Pengepakan
Pusat Pengeringan dan Penyimpanan Beras	843	—	843	Pengeringan dan Penyimpanan
Pabrik Pengolahan Hasil-hasil Pertanian	114*)	1	113	Penyulingan, Pengalengan, dan Pembakaran
Pusat Pemasaran & Perdagangan Besar Hasil-hasil Pertanian	82	12	70	Perdagangan Besar Melalui Pelelangan
Pusat Distribusi Hasil-hasil Pertanian	15**)	15	—	Distribusi Perdagangan Besar dan Supermarket Berskala Besar
Supermarket Hanaro Mart	2.159***)	56	2.103	Supermarket Berskala Sedang
Pusat Perbaikan Mesin-mesin Pertanian	615	—	615	Jasa Perbaikan Mesin
Pompa Pengisian Bahan Bakar Minyak & Gas	548	6	542	Perdagangan Eceran
Gudang Penyimpanan Minyak & Gas	513	22	491	Perdagangan Eceran
Pabrik Pakan Ternak	23	8	15	Pabrik Pakan Berskala Besar
Pasar Ternak	81	—	81	Transaksi Penjualan Ternak Hidup
Pusat Perdagangan Besar Ternak	8	4	4	Pemotongan dan Penjualan Karkas Melalui Pelelangan
Pabrik Susu	9	—	9	Pengumpulan & Pengolahan Susu

Keterangan: *) = Termasuk Pabrik Pengolahan Ginseng Milik Koperasi Pertanian NH Korea Ginseng Co., Ltd.
**) = Termasuk Lima Pusat Distribusi Milik Koperasi Pertanian NH Marketing Ltd. Dan Pusat Pemasaran Gandum
***) = Termasuk 14 Toko Eceran Ginseng Milik Koperasi Pertanian NH Korea Ginseng Co., Ltd.

Koperasi Pertanian di Korea Selatan menguasai dan mempraktekan *Total Agricultural Supply Chain Management* seperti ditunjukan dalam Bagan 7.

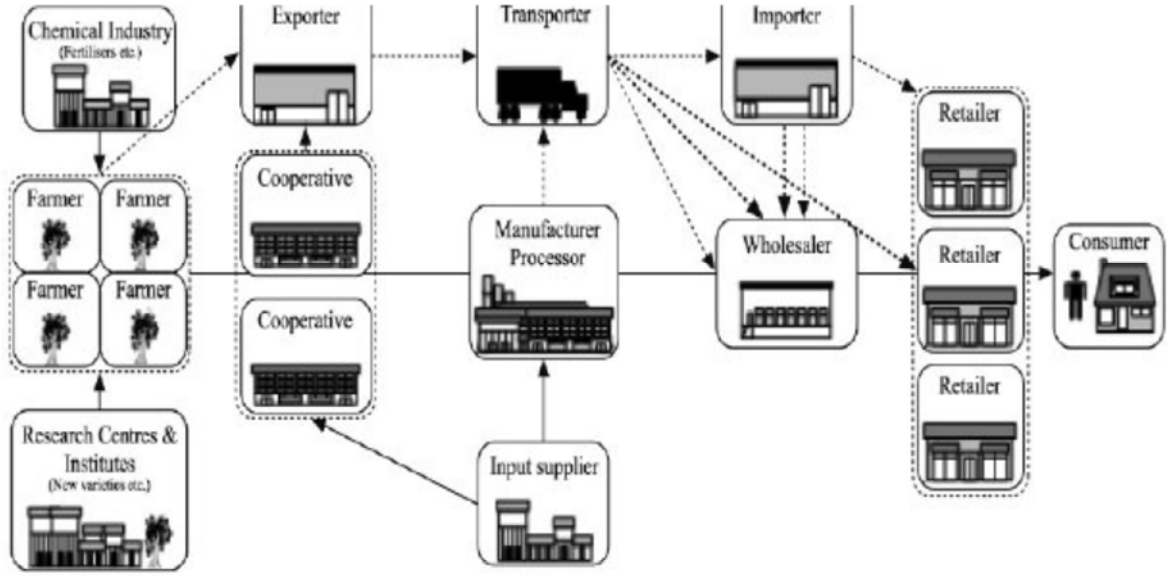

Total Agricultural Supply Chain Management Dijalankan dan Dikuasai Oleh Koperasi Pertanian (*National Agricultural Cooperative Federation*) Korea Selatan

Bagan 7 Model Bisnis Koperasi Pertanian Korea Selatan (Total Agricultural SCM)

III.2 Gerakan Masyarakat Baru Korea Selatan (Saemaul)

Gerakan Masyarakat Baru (GMB) di Korea Selatan disebut Saemaul. Saemaul yang terdiri dari "Sae" dan "Maul" adalah kombinasi dari dua kata korea yang berarti: Sae (Baru atau Pembaruan) dan Maul (Komunitas), yang berarti Komunitas/Masyarakat Baru atau Pembaruan Komunitas/Masyarakat. Gerakan Masyarakat Baru di Korea Selatan diperkenalkan pada 22 April 1970 oleh Presiden Korea Selatan Park Chung Hee, dan masih berjalan sampai sekarang. Pertama kali Gerakan Masyarakat Baru (GMB) di Korea Selatan ini dimaksudkan untuk memodernisasikan ekonomi pedesaan Korea Selatan berbasiskan pengaturan mandiri (*self-governance*) melalui koperasi-koperasi pedesaan (semacam Koperasi Unit Desa-KUD di Indonesia, kecuali manajemen yang berbeda sama sekali). Jika koperasi-koperasi di Indonesia dikelola secara parsial, maka koperasi-koperasi di Korea Selatan dikelola secara bisnis

terintegrasi (*integrated business*) dalam kerangka sistem industri *Agricultural Lean Supply Chain Management* yang sangat efisien, produktif, dan berkualitas, sejak dari industri hulu-*on farm*-sampai industri hilir. Aktivitas seperti pembibitan, produksi pertanian, *agro industry*, sampai pemasaran hasil-hasil pertanian dilakukan sepenuhnya oleh Koperasi Pertanian (National Agricultural Cooperative Federation) secara bisnis terintegrasi.

GMB berusaha untuk memperbaiki kesenjangan standar hidup antara daerah perkotaan, yang cepat berkembang karena penerapan strategi industrialisasi berorientasi ekspor, dan desa-desa kecil, yang terus terperosok dalam kemiskinan. Kolaborasi melalui koperasi-koperasi pedesaan terus-menerus mendorong anggota masyarakat terutama di daerah pedesaan (termasuk di perkotaan) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan ekonomi dan industri Korea Selatan.

Tahap awal dari GMB difokuskan pada peningkatan kondisi kehidupan dasar dan lingkungan melalui berbagai proyek-proyek yang berkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur pedesaan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan itu.

Model GMB yang melibatkan koperasi-koperasi di Korea Selatan ditunjukan dalam Bagan 8.

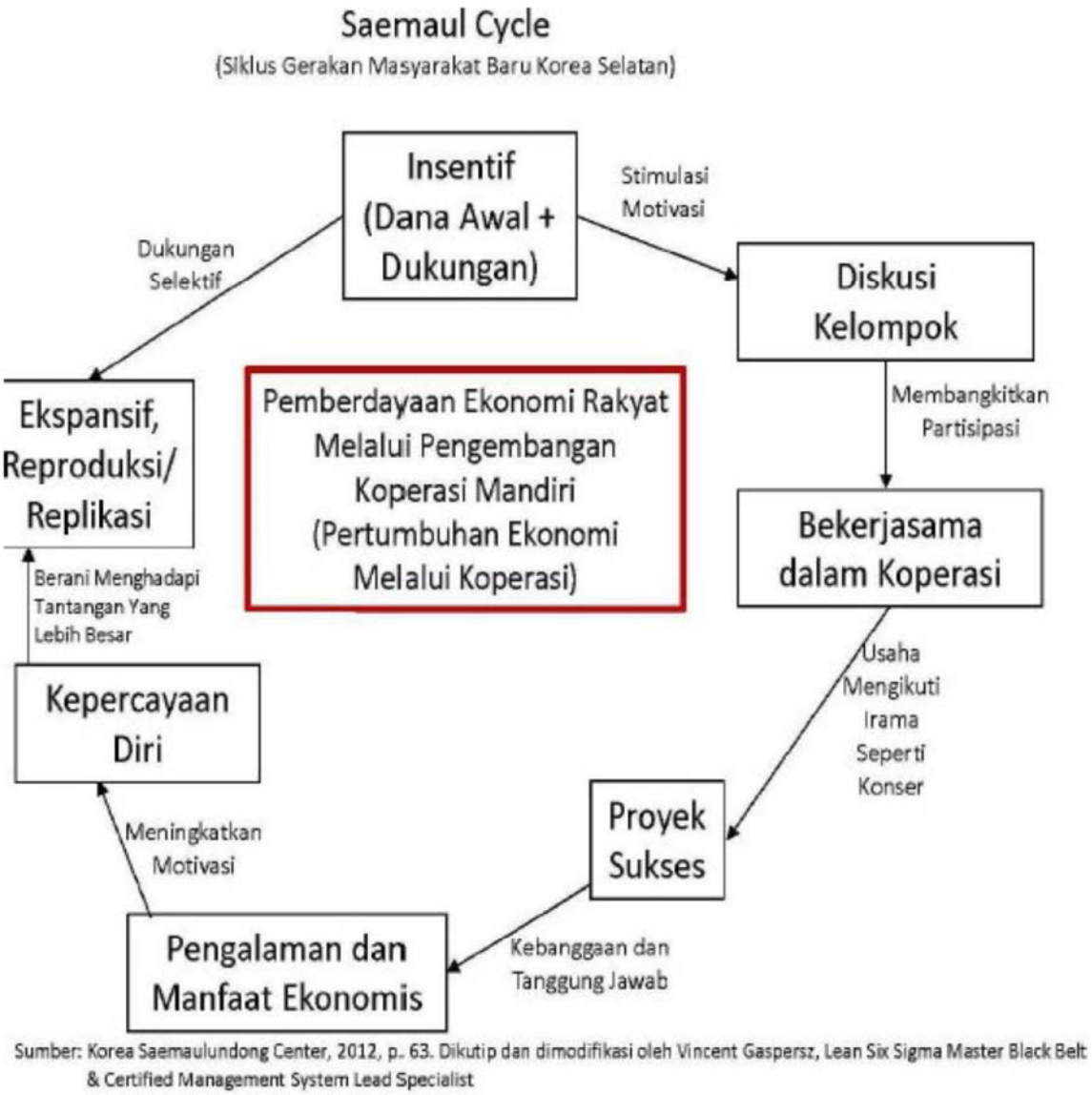

Bagan 8. Siklus Gerakan Masyarakat Baru (GMB) Korea Selatang

Di samping permodalan dan dukungan Pendidikan, pelatihan, dan sistem informasi manajemen (lihat Bagan 8 tentang Saemaul Cycle), pemerintah Korea Selatan juga membantu sistem administrasi koperasi yang terdiri dari 14 item berikut secara GRATIS:

1. Buku Bank
2. Deskripsi Umum Desa dan Kekayaan Desa
3. Rencana Bisnis

4. Buku Kas
5. Catatan daftar material yang diterima koperasi
6. Dokumen anggaran pengeluaran/pembelanjaan
7. Daftar tagihan pihak ketiga kepada koperasi
8. Catatan upah di desa
9. Minutes of meeting selama periode satu tahun
10. Peraturan-peraturan dan ketentuan dari Saemaul (Gerakan Masyarakat Baru)
11. Album foto-foto kegiatan
12. Catatan kemajuan kerja
13. Catatan daftar karyawan/pekerja/anggota-anggota koperasi
14. Rencana pemeliharaan hewan atau aktivitas sesuai bidang usaha dari koperasi, dll.

CATATAN: dukungan dari pemerintah ini HANYA untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan SDM Desa, TETAPI urusan bisnis, dll yang terkait dengan unit usaha akan bekerja sama dengan koperasi-koperasi lain yang mengacu kepada hubungan sinergitas yang saling menguntungkan dengan konglomerat koperasi NACF (National Agricultural Cooperatives Federation) yang menguasai pasar dari hulu sampai ke hilir seperti ditunjukan dalam Bagan 7 (lihat Bagan 7).

GMB telah diadopsi oleh PBB sebagai salah satu model pembangunan pedesaan yang paling EFISIEN di dunia. Komisi Ekonomi untuk Afrika (Economic Commision for Africa = ECA) telah memutuskan untuk memilih GMB sebagai model dasar untuk Program Modernisasi Pertanian Berkelanjutan dan Transformasi Pedesaan (SMART = Sustainable Modernization of Agriculture and Rural Transformation) pada tahun 2008. Selain itu, GMB ini telah diekspor ke lebih dari 70 negara untuk berbagi pengalaman pembangunan pedesaan di seluruh dunia. Indonesia seyogianya meniru GMB di Korea Selatan, karena pembangunan ekonomi melalui koperasi-koperasi yang mencapai skala usaha ekonomis (economies of scale) dan ruang

lingkup ekonomis (economies of scope) merupakan perwujudan dari implementasi Pasal 33 UUD 1945.

Di samping pembangunan ekonomi berbasis koperasi konglomerasi dan gerakan masyarakat baru di Korea Selatan, pemerintah Korea Selatan juga mendukung melalui serangkaian kebijakan yang konsisten diterapkan secara berkesinambungan. Kebijakan-kebijakan ekonomi makro tersebut dijelaskan secara singkat berikut.

Sasaran Utama Perekonomian Korea Selatan: Mempromosikan perekonomian nasional yang berdaya saing tinggi (kompetitif)

Sumber: Sung-Hee Jwa (2001)

Target I: Stabilisasi Harga

Target II: Peningkatan Efisiensi Ekonomi

Paket Kebijakan Stabilisasi Harga untuk Mencapai Target I (Stabilisasi Harga)

Tujuan Utama: Pencapaian stabilisasi ekonomi makro melalui kebijakan stabilisasi harga

A. Kebijakan Moneter: Mencapai Target No. 1 Stabilisasi Harga
   - Memberikan penguatan tanggung jawab dan kebebasan kepada Bank Sentral
   - Menerapkan manajemen moneter secara tidak langsung
   - Melaksanakan kebijakan moneter berlandaskan peraturan-peraturan
   - Menetapkan target maksimum inflasi

B. Kebijakan Fiskal: Mencapai Anggaran Berimbang (Balanced Budget)
   - Menerapkan anggaran berimbang (balanced budget)
   - Merencanakan anggaran jangka menengah (medium-term budget planning)

C. Kebijakan Nilai Tukar (Exchange Rate): Memulihkan fungsi harga dari nilai tukar
   - Liberalisasi pasar valuta asing
   - Pembukaan pasar modal
   - Peningkatan fleksibilitas nilai tukar

Paket Kebijakan Peningkatan Efisiensi Ekonomi untuk Mencapai Target II (Peningkatan Efisiensi Ekonomi)

Tujuan Utama: Mempromosikan persaingan pasar

Paket Normalisasi Mekanisme Harga

- Liberalisasi regulasi harga
- Meniadakan pengendalian harga
- Liberalisasi harga utilitas (utility price)

Paket Memperbesar Ranah Aktivitas Ekonomi Pribadi/Swasta (Private Economic Activity) Melalui Mengurangi Intervensi Pemerintah

- Manajemen ekonomi yang dipimpin/dikendalikan oleh sektor swasta
- Reformasi birokrasi
- Reformasi fiskal
- Deregulasi
- Privatisasi
- Liberalisasi keuangan

Paket Menurunkan Ongkos Transaksi dan Memaksimumkan Penghematan Melalui Menurunkan Ketidakpastian, Mendefinisikan Struktur Insentif Secara Baik, Menetapkan Ukuran-ukuran Distribusi Kekayaan, dan Ukuran-ukuran Anti Korupsi

- Reformasi hukum, institusi, dan bea cukai
- Peningkatan/Perbaikan sistem hak milik
- Perbaikan sistem transaksi keuangan
- Perbaikan sistem transaksi *real estate*
- Reformasi pajak
- Reformasi tenaga kerja
- Reformasi pendidikan
- Reformasi hukum

Paket Pembukaan Pasar Domestik

- Pembukaan pasar dalam negeri
- Liberalisasi investasi langsung dari luar negeri

Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa Korea Selatan yang sangat maju dalam perekonomian sehingga berubah dari negara miskin TANPA sumber daya alam pada tahun 1960-an menjadi negara kaya yang mengandalkan KOMPETENSI sumber daya manusia

sekarang, telah membuktikan bahwa sistem perekonomian yang dikendalikan oleh pemerintah (government control) yang penuh ke-TIDAK EFISIEN-an itu apabila ditransformasikan menjadi ekonomi pasar (market economy) akan memberikan kemajuan ekonomi yang sangat pesat.

Kasus Korea Selatan ini dianggap sebagai perubahan paradigma baru dalam teori ekonomi pembangunan (pendekatan baru dalam ilmu ekonomi pembangunan). Mengapa Korea Selatan SUCCESS melakukan transformasi sistem ekonomi dari *Government Control* menjadi *Market Economy*? Karena, Pertama, Pemerintah Korea Selatan sejak 1960-an menetapkan sasaran utama, yaitu: Meningkatkan Daya Saing Sistem Perekonomian Nasional, dengan dua target utama, (1) STABILISASI HARGA, dan (2) MENINGKATKAN EFISIENSI EKONOMI. Kemudian Target STABILISASI HARGA dilakukan dengan serangkaian kebijakan pemerintah seperti telah diuraikan di atas. Juga Target Peningkatan Efisiensi Ekonomi dilakukan dengan serangkaian kebijakan ekonomi.

Dan hal di atas yang menyebabkan Sistem Perekonomian Korea Selatan MAMPU mencapai target STABILISASI HARGA dan EFISIENSI EKONOMI sekaligus sehingga meningkatkan daya saing perekonomian nasional Korea Selatan yang kita sekarang telah mengetahui bahwa produk-produk dari Korea Selatan telah memasuki pasar Global dan MAMPU bersaing dengan produk-produk dari negara maju lainnya.

Dari penjelasan di atas, tampak bahwa Manajemen Sistem Ekonomi yang diterapkan menggunakan STRATEGI yang jelas (STABILISASI HARGA + EFISIENSI EKONOMI) akan mencapai SUCCESS GEMILANG, karena akan menciptakan EFISIENSI dalam sistem perekonomian, sehingga produk-produk yang dihasilkan akan berkompetisi secara ketat di pasar, di mana harga-harga produk akan tergantung pada kualitas dan produktivitas dari sistem ekonomi yang nota bene berada dalam sektor-sektor primer (pertanian, peternakan, perikanan,

kehutanan, perkebunan, pertambangan, dll); sektor-sektor sekunder (industri pengolahan dan manufaktur); sektor jasa (industri jasa, perdagangan, perbankan, dll).

Jika implementasi "Pasal 33 UUD 1945" model Korea Selatan di atas diterapkan di Indonesia, apalagi ditambah KOMITMEN pemerintah untuk menerapkan *Good Government Governance* mengikuti standar Internasional ISO 9001 yang telah didesain oleh penulis (lihat Bagan 9), maka penulis yakin bahwa Indonesia akan mampu mengejar ketertinggalannya dari Korea Selatan yang memulai pembanguan bersamaan dengan Indonesia.

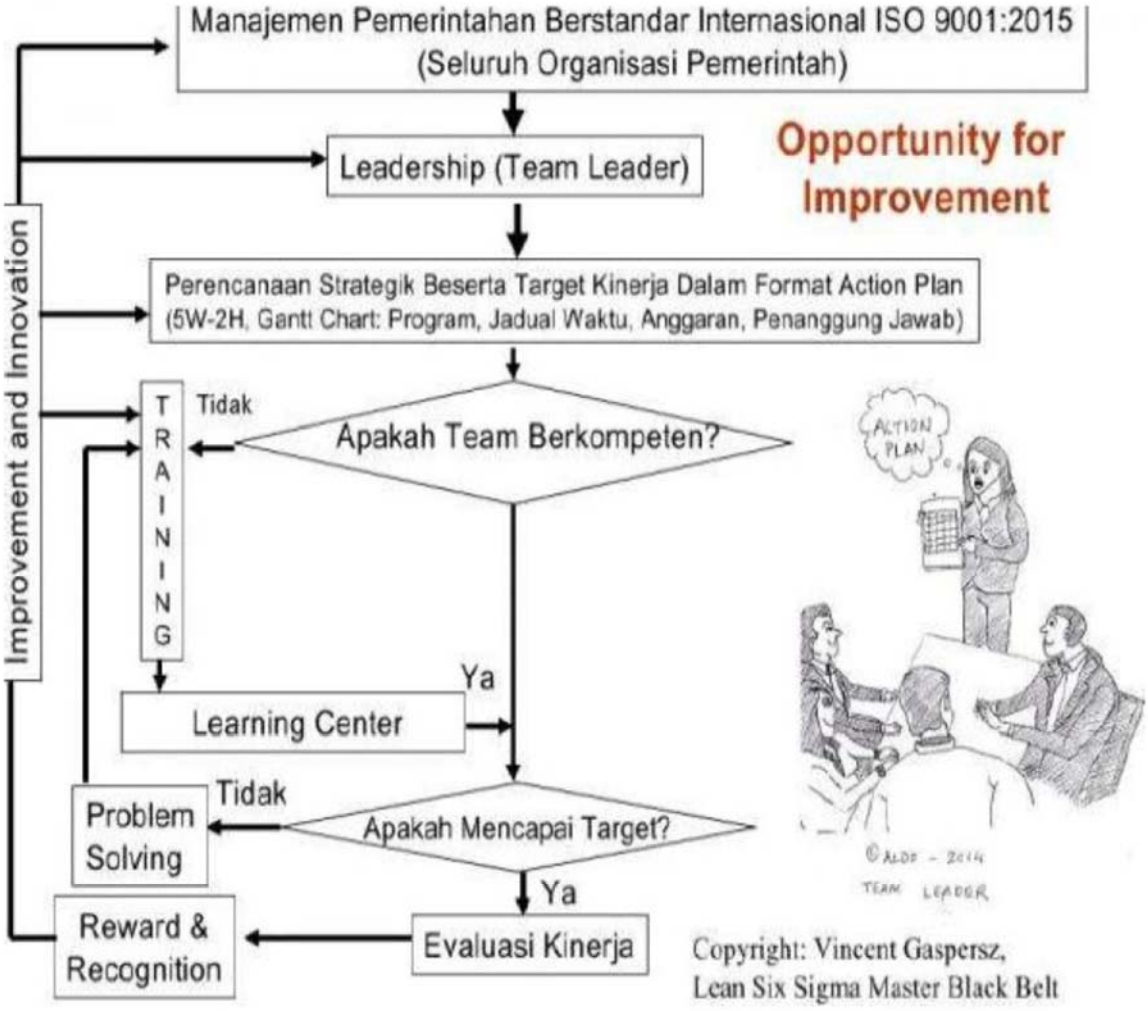

Bagan 9. Manajemen Pemerintahan Berstandar Internasional ISO 9001:2015
(Desain oleh Vincent Gaspersz, Lean Six Sigma Master Black Belt &
Certified Management System Lead Specialist)

IV. Strategi Membangun Perekonomian NTT Melalui Koperasi-koperasi Yang Mencapai Skala Usaha Ekonomis (Economies of Scale) dan Ruang Lingkup Ekonomis (Economies of Scope)

Pembangunan ekonomi NTT akan maju dan berkembang apabila menekankan pada pembangunan sumber daya manusia melalui wadah koperasi-koperasi yang memenuhi skala usaha ekonomis (economies of scale) dan ruang lingkup ekonomis (economies of scope). Model pembangunan sumber daya manusia NTT ditunjukan dalam Bagan 10.

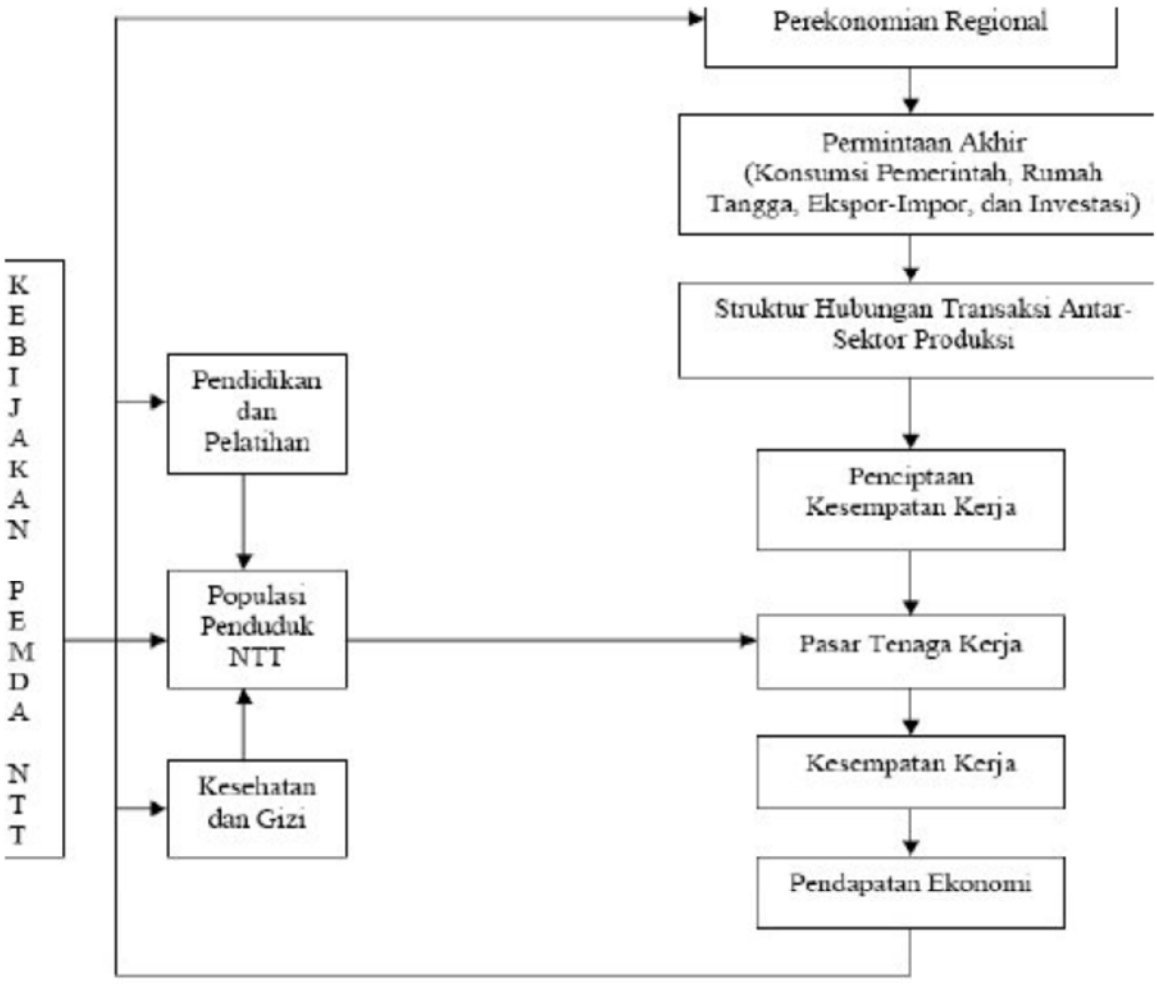

Bagan 10. Model Pembangunan Sumber Daya Manusia NTT
(Proposal Prof. Vincent Gaspersz)

Penjelasan Model Pembangunan Sumber Daya Manusia di Nusa Tenggara Timur:

- Pendekatan yang cocok untuk memecahkan masalah pembangunan sumber daya manusia di NTT, adalah mengintegrasikan bidang-bidang ekonomi, pendidikan dan pelatihan, serta kesehatan dan gizi secara terpadu (terintegrasi) dalam kerangka pendekatan sektoral (sektor-sektor produksi) dan pendekatan regional (kabupaten-kabupaten, kecamatan-kecamatan, dan desa-desa) secara utuh sebagai satu system perekonomian berbasis koperasi-koperasi yang mencapai skala usaha ekonomis (economies of scale) dan ruang lingkup ekonomis (economies of scope).
- Kedua pendekatan ini, sektoral dan regional harus diterapkan secara bersama. Dengan demikian model desain, perencanaan, implementasi, pengendalian, dan peningkatan terus-menerus pembangunan di Nusa Tenggara Timur HARUS selalu mengaitkan dimensi sektoral (sektor-sektor produksi) dengan dimensi spasial/ruang (kabupaten-kabupaten, kecamatan-kecamatan, dan desa-desa).
- Semua kebijakan PEMDA (Pemerintah Daerah) NTT HARUS berorientasi pada peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat, pendidikan dan pelatihan masyarakat, serta kesehatan dan gizi masyarakat secara terintegrasi dan terpadu dalam kerangka pendekatan pembangunan sektoral dan regional di atas dalam wadah koperasi-koperasi yang mencapai skala usaha ekonomis dan ruang lingkup ekonomis.
- Berkaitan dengan kebijakan peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat, maka HARUS ditumbuhkembangkan perekonomian regional melalui memprioritaskan pengembangan sektor-sektor produksi yang memiliki dampak pengganda pendapatan (income multiplier effect) dan kesempatan kerja terbesar (employment multiplier effect). Semua sektor-sektor produksi yang memiliki karakteristik pengganda pendapatan dan kesempatan kerja ini diakomodasikan ke dalam wadah koperasi-koperasi yang memenuhi skala usaha ekonomis dan ruang lingkup ekonomis.

- Berkaitan dengan kebijakan pendidikan dan pelatihan HARUS diarahkan agar sistem pendidikan dan pelatihan mampu memberikan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja lokal, nasional maupun internasional.
- Berkaitan dengan kebijakan kesehatan dan gizi HARUS memberdayakan masyarakat agar memelihara lingkungan hidup yang sehat dan bersahabat dengan alam sehingga mempertimbangkan sistem manajemen lingkungan yang berkelanjutan. Program-program pembangunan sumber daya manusia HARUS berkaitan dan bersinergi dengan aspek lingkungan di mana masyarakat itu berada sesuai dengan potensi wilayah dalam sektor-sektor produksi yang tergabung dalam sistem perekonomian wilayah berbasis koperasi-koperasi yang mencapai skala usaha ekonomis dan ruang lingkup ekonomis.

Model Strategi SUCCESS membangun NTT selalu mengaitkan integrasi tiga pihak, yaitu: (1) lembaga Pendidikan dan pelatihan, (2) lembaga keuangan dan perbankan, dan (3) koperasi-koperasi yang mencapai skala usaha ekonomis dan ruang lingkup ekonomis sebagai ujung tombak pengembangan perekonomian rakyat NTT. Pemerintah dan DPRD merupakan fasilitator yang mempercepat integrasi ketiga pihak ini seperti ditunjukan dalam Bagan 11.

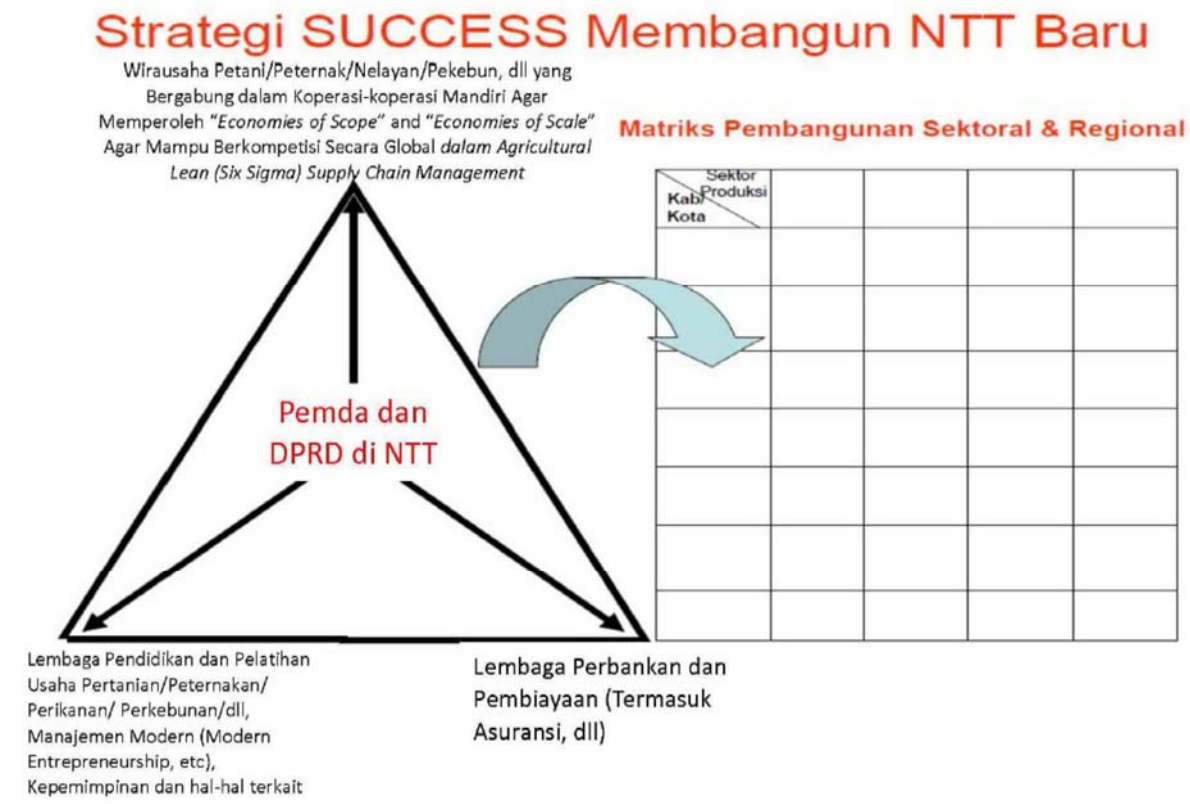

Bagan 11. Strategi SUCCESS Membangun NTT Baru (Desain oleh Vincent Gaspersz, Lean Six Sigma Master Black Belt & Certified Management Systems Lead Specialist)

Perlu diperhatikan bahwa koperasi-koperasi yang dimaksudkan dalam Bagan 11 di atas, adalah koperasi-koperasi yang telah mencapai skala usaha ekonomis dan ruang lingkup ekonomis agar koperasi-koperasi itu mampu bersaing di pasar. Di samping itu perlu dipertimbangkan untuk melakukan proses konglomerasi koperasi-koperasi, sehingga mampu mencapai ruang lingkup ekonomis seperti koperasi-koperasi di Korea Selatan. Agar diketahui bahwa meskipun jumlah koperasi di NTT cukup banyak, tetapi koperasi-koperasi itu tidak mencapai skala usaha ekonomis dan ruang lingkup ekonomis, yang berarti koperasi-koperasi yang ada merupakan koperasi usaha kecil yang tidak ekonomis.

Tabel 3. Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Lainnya di NTT, 2016

Rank	Jumlah Koperasi	Kabupaten/Kota	Anggota	Anggota/Koperasi	KUD	Koperasi Lainnya
1	520	Kota Kupang	81.190	156	1	519
2	327	Kab. Kupang	25.407	78	18	309
3	186	Flores Timur	51.974	279	9	177
4	177	Rote Ndao	12.195	69	1	176
5	165	Alor	19.960	121	9	156
6	164	Manggarai	38.138	233	4	160
7	156	Sikka	92.496	593	5	151
8	153	Sumba Timur	20.111	131	1	152
9	149	Timor Tengah Selatan	36.983	248	11	138
9	149	Belu	19.045	128	4	145
11	144	Sumba Barat Daya	12.891	90	5	139
12	142	Ende	37.141	262	8	134
13	135	Manggarai Barat	16.397	121	1	134
14	125	Malaka	15.655	125	5	120
15	116	Ngada	36.030	311	4	112
16	113	Sumba Barat	25.678	227	4	109
17	107	Lembata	43.468	406	4	103
18	103	Timor Tengah Utara	8.373	81	6	97
19	99	Manggarai Timur	19.146	193	3	96
20	89	Nagekeo	49.518	556	3	86
21	49	Sumba Tengah	1.566	32	3	46
22	46	Sabu Raijua	2.417	53	0	46
Total	3.414	—	665.779	195	109	3.305

Sumber: Vincent Gaspersz, 2017 (Dok. Pribadi). Analisis dari Nusa Tenggara Timur dalam Angka 2017. Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi NTT.

Bagi profesional bisnis: Opportunity is NOWHERE (Kesempatan Tidak Ada Di mana-mana) SELALU dibaca Opportunity is NOW HERE (Kesempatan Ada Di sini Sekarang).

Hasil analisis tentang komoditas pangan yang sangat penting, yaitu BERAS di Provinsi Nusa Tenggara Timur seperti ditunjukan dalam Tabel 4, memunculkan Kesempatan Bisnis Beras yang terbuka lebar bagi Koperasi Konsumsi dan Koperasi Distribusi di Provinsi NTT.

Dengan cara analisis yang sama terhadap berbagai komoditas penting seperti: daging sapi, daging ayam, dll akan memunculkan kesempatan bisnis (Business Opportunity) bagi koperasi-koperasi di NTT untuk mencapai skala usaha ekonomis (economies of scale) dan ruang lingkup ekonomis (economies of scope).

Dari Tabel 4 juga menimbulkan pertanyaan REFLEKSI tentang apa peranan lembaga Pendidikan pertanian di NTT yang “TIDAK MAMPU” meningkatkan produksi pangan lokal

(beras) ini, sehingga kontribusi pada pengadaan beras yang berasal dari produksi lokal pada tahun 2016 HANYA sekitar 1,6% (satu koma enam persen) saja?

Tabel 4. Hasil Analisis Kesempatan Bisnis Beras (Business Opportunity) di Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Informasi Tahun 2014-2016

Variabel	Deskripsi	Tahun 2014	Persen 2014	Tahun 2015	Persen 2015	Tahun 2016	Persen 2016
Realisasi Konsumsi Beras	Kebutuhan Konsumsi Beras (ton)	110.079,00	100,00%	124.237,00	100,00%	110.501,23	100,00%
	Stock Awal (ton)	24.186,00	21,97%	21.205,00	17,07%	25.691,01	23,25%
	Stock Akhir (ton)	21.205,00	19,26%	25.890,00	20,84%	26.671,77	24,14%
	Rencana Produksi (Pengadaan, ton)	107.098,00	97,29%	128.922,00	103,77%	111.481,99	100,89%
	Persediaan Beras (ton)	131.284,00	119,26%	150.127,00	120,84%	137.173,00	124,14%
Realisasi Produksi/Pengadaan Beras	Realisasi Pengadaan/Hasil Produksi dari Provinsi Lain (ton)	97.552,00	91,09%	124.015,00	96,19%	89.627,00	80,40%
	Impor dari Luar Negeri (ton)	3.897,00	3,64%	0,00	0,00%	20.000,00	17,94%
	Pengadaan/Produksi Lokal dari dalam Provinsi NTT (ton)	5.649,00	5,27%	4.907,00	3,81%	1.854,99	1,66%
	Total Realisasi Pengadaan Beras (ton)	107.098,00	100,00%	128.922,00	100,00%	111.481,99	100,00%

Sumber: Vincent Gaspersz, 2017 (Dok. Pribadi). Hasil Analisis Data dari Perum Bulog Divisi Regional Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2017

Berbagai pemikiran di atas akan MAMPU meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) NTT secara signifikan dibandingkan IPM NTT pada saat sekarang. Indeks Pembangunan Manusia diukur berdasarkan komponen-komponen: kesehatan (umur harapan hidup), komponen pendidikan (angka melek huruf dan lama sekolah), dan komponen pendapatan ekonomi (pengeluaran yang disesuaikan). Indeks Pembangunan Manusia NTT periode 2012-2016 ditunjukan dalam Tabel 5. Sedangkan ketimpangan pembangunan sumber daya manusia di antara kabupaten dan kota di dalam Provinsi NTT ditunjukan dalam Tabel 6.

Tabel 5. Ranking Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi-provinsi di Indonesia Periode 2012-2016

Rank 2016	IPM 2016	% terhadap IPM Indonesia	Provinsi	IPM 2012	IPM 2013	IPM 2014	IPM 2015
1	79,60	113,42%	DKI Jakarta	77,53	78,08	78,39	78,99
2	78,38	111,68%	DI Yogyakarta	76,15	76,44	76,81	77,59
3	74,59	106,28%	Kalimantan Timur	72,62	73,21	73,82	74,17
4	73,99	105,43%	Kepulauan Riau	72,36	73,02	73,40	73,75
5	73,65	104,94%	Bali	71,62	72,09	72,48	73,27
6	71,20	101,45%	Riau	69,15	69,91	70,33	70,84
7	71,05	101,24%	Sulawesi Utara	69,04	69,49	69,96	70,39
8	70,96	101,11%	Banten	68,92	69,47	69,89	70,27
9	70,73	100,78%	Sumatera Barat	68,36	68,91	69,36	69,98
10	70,05	99,81%	Jawa Barat	67,32	68,25	68,80	69,50
11	70,00	99,74%	Aceh	67,81	68,30	68,81	69,45
11	70,00	99,74%	Sumatera Utara	67,74	68,36	68,87	69,51
13	69,98	99,72%	Jawa Tengah	67,21	68,02	68,78	69,49
14	69,76	99,40%	Sulawesi Selatan	67,26	67,92	68,49	69,15
15	69,74	99,37%	Jawa Timur	66,74	67,55	68,14	68,95
16	69,62	99,20%	Jambi	66,84	67,76	68,24	68,89
17	69,55	99,10%	Kep. Bangka Belitung	67,21	67,92	68,27	69,05
18	69,33	98,79%	Bengkulu	66,61	67,50	68,06	68,59
19	69,31	98,76%	Sulawesi Tenggara	67,07	67,55	68,07	68,75
20	69,20	98,60%	Kalimantan Utara	--	67,99	68.64	68.76
21	69,13	98,50%	Kalimantan Tengah	66,66	67,41	67,77	68,53
22	69,05	98,39%	Kalimantan Selatan	66,68	67,17	67,63	68,38
23	68,24	97,24%	Sumatera Selatan	65,79	66,16	66,75	67,46
24	67,65	96,39%	Lampung	64,87	65,73	66,42	66,95
25	67,60	96,32%	Maluku	65,43	66,09	66,74	67,05
26	67,47	96,14%	Sulawesi Tengah	65,00	65,79	66,43	66,76
27	66,63	94,94%	Maluku Utara	63,93	64,78	65,18	65,91
28	66,29	94,46%	Gorontalo	64,16	64,70	65,17	65,86
29	65,88	93,87%	Kalimantan Barat	63,41	64,30	64,89	65,59
30	65,81	93,77%	Nusa Tenggara Barat	62,98	63,76	64,31	65,19
31	63,60	90,62%	Sulawesi Barat	61,01	61,53	62,24	62,96
32	63,13	89,95%	Nusa Tenggara Timur	60,81	61,68	62,26	62,67
33	62,21	88,64%	Papua Barat	60,30	60,91	61,28	61,73
34	58,05	82,72%	Papua	55,55	56,25	56,75	57,25
---	70,18	100,00%	Indonesia	67,70	68,31	68,90	69,55

Sumber: Vincent Gaspersz, 2017 (Dok. Pribadi). Hasil Analisis dari Buku Seri Publikasi IPM Indonesia.
Seri Publikasi Indeks Pembangunan Manusia, BPS Statistics, Indonesia, 2017

Jika kita melihat IPM Provinsi NTT tahun 2016 sebesar 63,13 kemudian membandingkan dengan IPM Kabupaten/Kota di dalam Provinsi NTT, maka HANYA ada lima kabupaten dan kota yang memiliki IPM di atas rata-rata NTT, yaitu: (1) Kota Kupang (78,14), (2) Ende (65,74), (3) Ngada (65,61), (4) Nagekeo (63,93), dan (5) Sumba Timur (63,22). 17 kabupaten memiliki IPM yang lebih rendah daripada IPM NTT (lihat Tabel 6).

Tabel 6. IPM Kabupaten/Kota di NTT Tahun 2016 Beserta Indeks Persentase Terhadap IPM NTT dan IPM Indonesia

Rank 2016	Kab/Kota	IPM 2016	Indeks (%) terhadap IPM NTT	Indeks (%) terhadap IPM Indonesia
1	Kota Kupang	78,14	123,78%	111,34%
2	Ende	65,74	104,13%	93,67%
3	Ngada	65,61	103,93%	93,49%
4	Nagekeo	63,93	101,27%	91,09%
5	Sumba Timur	63,22	100,14%	90,08%
6	Lembata	62,81	99,49%	89,50%
7	Sikka	62,42	98,88%	88,94%
8	Kupang	62,39	98,83%	88,90%
9	Flores Timur	61,90	98,05%	88,20%
10	Sumba Barat	61,85	97,97%	88,13%
11	Manggarai	61,67	97,69%	87,87%
12	Timor Tengah Utara	61,54	97,48%	87,69%
13	Sumba Barat Daya	61,31	97,12%	87,36%
14	Belu	61,04	96,69%	86,98%
15	Manggarai Barat	60,63	96,04%	86,39%
16	Timor Tengah Selatan	60,37	95,63%	86,02%
17	Rote Ndao	59,28	93,90%	84,47%
18	Alor	58,99	93,44%	84,06%
19	Sumba Tengah	58,52	92,70%	83,39%
20	Malaka	58,29	92,33%	83,06%
21	Manggarai Timur	57,50	91,08%	81,93%
22	Sabu Raijua	54,16	85,79%	77,17%
IPM NTT (2016) = 63,13. IPM Indonesia (2016) = 70,18			100% (IPM = 63,13)	100% (IPM = 70,18)

Sumber: Vincent Gaspersz, 2017 (Dok. Pribadi). Hasil Analisis dari Nusa Tenggara Timur dalam Angka 2017. Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2017.

V. Sekilas Tentang Kinerja Koperasi dan Industri di DI Yogyakarta

Meskipun perkembangan koperasi-koperasi di DI Yogyakarta belum sebaik dibandingkan perkembangan koperasi-koperasi di Korea Selatan tetapi perkembangan koperasi dan industri kecil di DI Yogyakarta ini sangat membantu dalam peningkatan ekonomi masyarakat sehingga mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) DI Yogyakarta untuk mencapai ranking nomor dua di Indonesia. Bagaimanapun konglomerasi koperasi telah ada di Pekalongan, Jawa Tengah, di mana Kospin (Koperasi Simpan Pinjam) Jasa Pekalongan telah mencapai skala usaha ekonomis dan ruang lingkup ekonomis karena telah memiliki asset sekitar Rp. 7 Triliun pada tahun 2016 dengan jumlah anggota koperasi sebanyak 18.375 orang, atau rata-rata asset per anggota adalah Rp. 380.952.381. (lihat: https://ekbis.sindonews.com/read/1189554/34/aset-kospin-jasa-mencapai-rp7-triliun-1489828190)

Beberapa indikator kinerja koperasi dan industri kecil di Yogyakarta pada tahun 2016 ditunjukan dalam Tabel 7.

Tabel 7 Kinerja Koperasi dan Industri di Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2016

No.	Jumlah Koperasi (Unit)	Kab/Kota/ Provinsi	Jumlah Anggota (Orang)	Anggota/ Koperasi (Orang)	Volume Usaha (Rp. Juta)	Volume Usaha/Kope-rasi (Rp. Juta)	Modal (Rp. Juta)	Volume Usaha/Anggo-ta (Rp. Juta)	Modal/Unit Koperasi (Rp. Juta)	Modal/Anggota (Rp Juta)	Desa/Ke-lurahan	*)PDRB (Rp. Milyar)
1	656	Sleman	311.682	475	1.229.354	1.874	743.267	3,94	1.133	2,38	88	29.574
2	554	Yogyakarta	66.872	121	394.408	712	292.451	5,90	528	4,37	75	23.538
3	488	Bantul	151.684	311	1.315.239	2.695	521.097	8,67	1.068	3,44	144	16.378
4	387	Kulonprogo	87.295	226	201.826	522	275.726	2,31	712	3,16	86	6.581
5	276	Gunungkidul	80.140	290	530.859	1.923	318.061	6,62	1.152	3,97	45	11.697
6	316	Provinsi	160.017	506	700.253	2.216	678.659	4,38	2.148	4,24		
Total	2.677	—	857.690	320	4.371.939	1.633	2.829.261	5,10	1.057	3,30	438	87.768

*)PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 (AHK 2010)

No.	Jumlah Industri mikro (Unit)	Kab/Kota/ Provinsi	Jumlah Naker (Orang)	Naker/Indu stri Mikro (Orang)	Nilai Output (Rp. Juta)	Nilai Output/Industri Mikro (Rp. Juta/unit)	Produktivitas Naker (Rp. Juta/orang)
1	17.595	Sleman	67.254	4	787.787	45	11,71
2	5.469	Yogyakarta	28.055	5	404.648	74	14,42
3	21.159	Bantul	92.134	4	1.600.379	76	17,37
4	24.023	Kulonprogo	68.616	3	288.837	12	4,21
5	22.660	Gunungkidul	77.921	3	561.571	25	7,21
Total	90.906	DI Yogyakarta	333.980	4	3.643.222	40	10,91

Sumber: Vincent Gaspersz, 2017 (Dok. Pribadi). Hasil Analisis dari Provinsi DI Yogyakarta dalam Angka 2017. Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta, 2017.

Jumlah industri besar dan sedang (IBS) di DI Yogyakarta sebanyak 339 unit yang menyerap 58.508 tenaga kerja.

Klasifikasi industri manufaktur: Industri Besar (Naker >= 100 orang), Industri Sedang/Menengah (Naker: 20 - 99 orang), Industri Mikro (Naker: 1 - 4 orang)

Produktivitas Anggota Koperasi di DI Yogyakarta = Volume Usaha per Anggota = Rp. 5,10 juta.

Produktivitas Tenaga Kerja Industri Mikro di DI Yogyakarta = Nilai Output per Naker = Rp. 10,91 juta.

Produktivitas Tenaga Kerja di DI Yogyakarta = PDRB per Naker = Rp. 87.768.000.000.000/2.042.400 = Rp. 42.972.972,97 (AHK 2010)

Pendapatan Per Kapita DI Yogyakarta = Rp. 87.768.000.000.000/3.720.900 = Rp. 23.587.841,65 (AHK 2010)

Meskipun pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 5,18% lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi DI Yogyakarta yang hanya 5,05% TETAPI berbagai indikator kinerja pendidikan dan ekonomi DI Yogyakarta lebih unggul daripada Provinsi Nusa Tenggara Timur seperti ditunjukan dalam Tabel 8.

Hal yang menarik dari Tabel 8 adalah memunculkan kesempatan bisnis untuk mendirikan koperasi-koperasi pertanian yang mencapai skala usaha ekonomis dan ruang lingkup ekonomis sehingga mampu meningkatkan nilai tukar petani seperti yang dilakukan

pada koperasi-koperasi pertanian di DI Yogyakarta. Di samping itu peluang mendirikan koperasi-koperasi konsumsi yang layak secara ekonomis, sehingga memunculkan kesempatan kepada anggota-anggota koperasi konsumsi yang mencapai skala usaha ekonomis dan ruang lingkup ekonomis agar di samping melakukan konsumsi juga memperoleh pendapatan dari aktivitas konsumsi itu.

Tabel 8. Perbandingan PDRB Sektoral Atas Dasar Harga Konstan (AHK) Tahun 2010 DI Yogyakarta Vs. Nusa Tenggara Timur Beserta Perbedaan Berbagai Indikator Kinerja Tahun 2016

Kode	Sektor	DI Yogyakarta			Nusa Tenggara Timur		
		PDRB (Rp. Milyar)	Persen	Pertum-buhan	PDRB (Rp. Milyar)	Persen	Pertum-buhan
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.780	8,87%	1,46%	16.504	27,61%	2,23%
B	Pertambangan dan Penggalian	473	0,54%	0,42%	880	1,47%	5,66%
C	Industri Pengolahan	11.235	12,81%	5,07%	745	1,25%	4,98%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	146	0,17%	14,26%	47	0,08%	14,61%
E	Pengadaan Air	87	0,10%	2,36%	40	0,07%	0,38%
F	Konstruksi	8.251	9,41%	5,42%	6.543	10,95%	8,46%
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.368	8,40%	6,09%	6.933	11,60%	6,77%
H	Transportasi dan Pergudangan	4.751	5,42%	4,61%	3.037	5,08%	6,73%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.275	9,43%	5,51%	387	0,65%	14,46%
J	Informasi dan Komunikasi	9.631	10,98%	8,32%	5.257	8,79%	6,76%
K	Jasa Keuangan	3.231	3,68%	4,98%	2.361	3,95%	8,47%
L	Real Estate	6.395	7,29%	5,14%	1.507	2,52%	3,41%
M,N	Jasa Perusahaan	1.026	1,17%	3,43%	170	0,28%	2,83%
O	Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial	6.656	7,59%	5,57%	7.656	12,81%	5,63%
P	Jasa Pendidikan	7.673	8,75%	3,07%	5.162	8,64%	4,18%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.310	2,63%	4,52%	1.288	2,15%	6,19%
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2.420	2,76%	5,70%	1.259	2,11%	3,55%
Total (PDRB dan Kontribusi), dan Rata-rata Pertumbuhan		**87.708**	**100,00%**	**5,05%**	**59.776**	**100,00%**	**5,18%**
No	**Deskripsi Indikator Kinerja**	**DI Yogyakarta**			**Nusa Tenggara Timur**		
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2016	78,38 (Ranking 2 Indonesia)			63,13 (Ranking 32 Indonesia)		
2.	Produktivitas Tenaga Kerja 2016 (AHK 2010)	Rp42.943.596			Rp26.251.302		
3.	Persentase Penduduk Miskin 2016	13,34%			22,19%		
4.	Indeks harga yang diterima petani (I-t) tahun 2016	128,07%			121,77%		
5.	Indeks harga yang dibayar petani (I-b) tahun 2016	123,04%			118,58%		
6.	Nilai Tukar Petani (NTP) = (I-t / I-b) x 100%	104,09%			102,69%		
7.	Tingkat Pengangguran 2016	2,72%			3,25%		
8.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 2016	71,96%			69,18%		
9.	Pendidikan Tenaga Kerja Lulus SD & ke bawah 2016	30,10%			56,22%		
10.	Pendidikan Tenaga Kerja Lulus SMP 2016	18,87%			12,89%		
11.	Pendidikan Tenaga Kerja Lulus SMA & ke atas 2016	51,03%			30,89%		
12.	Jumlah dana yang dihimpun dari masyarakat 2016	Rp54.365.547.000.000			Rp21.942.907.000.000		
13.	Jumlah account di bank umum tahun 2016	3.922.728			2.788.356		
14.	Rata-rata jumlah dana simpanan per account 2016	Rp13.859.117			Rp7.869.478		
15.	Jumlah kredit yang disalurkan 2016	Rp34.649.818.000.000			Rp23.289.350.000.000		
16.	Penggunaan kredit untuk modal kerja 2016	38,50%			31,56%		
17.	Penggunaan kredit untuk investasi 2016	21,81%			7,38%		
18.	Penggunaan kredit untuk konsumsi 2016	39,69%			61,06%		

Sumber: Vincent Gaspersz, 2017 (Dok. Pribadi). Hasil Analisis dari Provinsi NTT dalam Angka 2017 dan Provinsi DI Yogyakarta dalam Angka 2017. Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2017 dan Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta, 2017.

VI. Kesimpulan dan Rekomendasi Manajemen

Strategi peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat Korea Selatan yang dilakukan melalui koperasi-koperasi yang mengelola bisnis mereka dalam suatu manajemen ke-SISTEM-an industri yang kuat, kapabel, handal, produktif dan berkualitas dapat dijadikan teladan untuk membangun koperasi-koperasi yang mencapai skala usaha ekonomis (economies of scale) dan ruang lingkup ekonomis (economies of scope) baik di Indonesia pada umumnya maupun di Nusa Tenggara Timur pada khususnya.

Agricultural Lean Supply Chain Management di Korea Selatan yang dilakukan melalui koperasi-koperasi pertanian yang memenuhi skala usaha ekonomis dan ruang lingkup ekonomis mulai dari pedesaan sampai perkotaan telah mensejahterakan petani-petani dan tenaga kerja yang terlibat dalam sektor-sektor industri hulu sampai hilir. Sesungguhnya sistem perkoperasian serta model pembangunan di Korea Selatan ini yang sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, sehingga meskipun Korea Selatan tidak memiliki UUD 1945 tetapi mereka jauh lebih maju dari kita di Indonesia. Pembuat kebijakan pembangunan ekonomi dan industri serta pembangunan sumber daya manusia di Indonesia HARUS belajar pada keberhasilan Korea Selatan, sebuah Negara yang sangat miskin pada tahun 1960-1970 TELAH bertransformasi menjadi Negara maju berproduktivitas dan berpendapatan tinggi di Asia.

Pendekatan yang cocok untuk memecahkan masalah pembangunan sumber daya manusia di NTT, adalah mengintegrasikan bidang-bidang ekonomi, pendidikan dan pelatihan, serta kesehatan dan gizi secara terpadu (terintegrasi) dalam kerangka pendekatan sektoral (sektor-sektor produksi) dan pendekatan regional (kabupaten-kabupaten, kecamatan-kecamatan, dan desa-desa) secara utuh sebagai satu sistem perekonomian berbasis koperasi-koperasi yang mencapai skala usaha ekonomis (economies of scale) dan ruang lingkup ekonomis (economies of scope).

Kedua pendekatan ini, sektoral dan regional harus diterapkan secara bersama. Dengan demikian model desain, perencanaan, implementasi, pengendalian, dan peningkatan terus-menerus pembangunan di Nusa Tenggara Timur HARUS selalu mengaitkan dimensi sektoral (sektor-sektor produksi) dengan dimensi spasial/ruang (kabupaten-kabupaten, kecamatan-kecamatan, dan desa-desa).

Hasil analisis terhadap indikator kinerja memunculkan kesempatan bisnis untuk mendirikan koperasi-koperasi pertanian (koperasi produksi pertanian) di Nusa Tenggara Timur yang mencapai skala usaha ekonomis dan ruang lingkup ekonomis sehingga mampu meningkatkan nilai tukar petani seperti yang dilakukan pada koperasi-koperasi pertanian di DI Yogyakarta. Di samping itu peluang mendirikan koperasi-koperasi konsumsi yang layak secara ekonomis, sehingga memunculkan kesempatan kepada anggota-anggota koperasi konsumsi yang mencapai skala usaha ekonomis dan ruang lingkup ekonomis agar di samping melakukan konsumsi juga memperoleh pendapatan dari aktivitas konsumsi itu. Pada akhirnya akan terbentuk konglomerasi koperasi seperti Kospin (koperasi simpan pinjam) Jasa Pekalongan yang pada tahun 2016 telahmemiliki asset senilai Rp. 7 Triliun dengan jumlah anggota sebanyak 18.375 orang atau rata-rata asset per anggota sebesar Rp. 380.952.381.

VII. Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2017. ***Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Angka 2017***.

Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta. 2017. ***Provinsi DI Yogyakarta dalam Angka 2017***.

Gaspersz, Vincent., 2011. ***Ekonomi Manajerial (Managerial Economics), Landasan Analisis dan Startegi Bisnis untuk Manajemen Perusahaan dan Industri***. Tri-Al Bros, Bogor.

Gaspersz, Vincent, 2013. ***All-in-one 150 Key Performance Indicators and Balanced Scorecard, Malcolm Baldrige, Lean Six Sigma Supply Chain Management***. Tri-Al Bros, Bogor.

Hugos, M. 2003. ***Essentials of Supply Chain Management***. E-Book Edition, John Wiley and Sons, Inc., New Jersey.

Kaplan, R.S. and David P. Norton. 1996. ***The Balanced Scorecard—Translating Strategy into Action***. Harvard Business School Press, Massachusetts.

Keel, J., Albert Hawkins, and Lawrence F. Alwin. 1999. ***Guide to Performance Measurement Management***. Governor's Office of Budget and Planning, USA.

Lee, Joong Hwa, Jose Arturo Garza-Reyes, Vikas Kumar, Luis Rocha Lona, and Nishikant Mishra. 2013. ***A Comparative Study of the Implementation Status of Lean Six Sigma in South Korea and the UK***. *23rd International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing. Vol 1.*, Springer International Publishing, Switzerland.

Sandiford, F. and George Ed Rossmiller. 1996. ***Many a Slip: Studying Policy Delivery Systems***. *Paper presented at the Agricultural Economics Society Conference, University of Newcastle-upon-Tyne, 27-30 March 1996.*

Sung-Hee Jwa. 2001. ***Experiences of Economic Reforms in Korea and Future Challenges: A New Paradigm for Korea's Economic Development—From Government Control to Market Economy.*** Palgrave, Macmillan, London.

Young-Kon, Koh. (2013). ***An Integrated Value Chain Finance in Agriculture: Experience of Agriculture Cooperative in Korea.*** *Paper presented at the Policy Dialogue Forum on Value Chain Finance in Agriculture, Sep 3-5, 2013, Kathmandu, Nepal*.

World Bank. 2014. *2014* ***World Development Indicators***. The World Bank, Washington DC.

http://www.vincentgaspersz.com/2017/09/07/desain-dan-implementasi-model-strategik-pembangunan-ekonomi-berbasis-koperasi-yang-memiliki-skala-usaha-ekonomis-economies-of-scale-dan-ruang-lingkup-ekonomis-economies-of-scope/

http://bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=23&notab=7

http://www.nonghyup.com/eng/main/main.aspx

http://en.wikipedia.org/wiki/National_Agricultural_Cooperative_Federation

http://news.okezone.com: Profil Koperasi-koperasi Kelas Dunia, 2009.

https://ekbis.sindonews.com/read/1189554/34/aset-kospin-jasa-mencapai-rp7-triliun-1489828190

TENTANG Penulis/Pemakalah

Prof. Dr(Eng). Vincent Gaspersz, IPU, AER, adalah Ahli Teknik Sistem dan Manajemen Industri, Lean Six Sigma Master Black Belt and Certified Management Systems Lead Specialist.

Ia meraih gelar Sarjana Peternakan (Ir.) dari Universitas Nusa Cendana Kupang, 1979, Magister Sains dalam bidang Statistika Terapan (*Master of Science in Applied Statistics*) dengan pilihan penerapan pada ekonomi dan perencanaan wilayah dari IPB Bogor dalam waktu kurang dari dua tahun pada tahun 1985. Kemudian ia memperoleh gelar Doktor (Dr) dalam bidang Teknik Sistem dan Manajemen Industri dengan meraih indeks prestasi tertinggi IP = 4,0 dari ITB Bandung dalam waktu tiga tahun pada tahun 1991, di bawah bimbingan (promotor) Bapak Pendiri Teknik Industri di Indonesia (ITB) yaitu: Prof. Matthias Aroef.

Prof. Vincent Gaspersz memperoleh empat gelar professional dalam bidang-bidang: Production, Inventory, and Supply Chain Management dari the American Production and Inventory Society, yaitu: (1) CPIM = Certified in Production Management (CPIM), (2) CPIM-F (Certified in Production and Inventory Management-Fellow), (3) CSCP (Certified Supply Chain Professional), dan (4) CSCP-F (Certified Supply Chain Professional-Fellow). Ia juga memperoleh lima gelar profesional dalam bidang Quality Management dari the American Society for Quality, yaitu: (1) CMQ/OE (Certified Manager of Quality/Organizational Excellence), (2) CSSBB (Certified Six Sigma Black Belt), (3) CQE (Certified Quality Engineer), (4) CQA (Certified Quality Auditor), dan (5) CQIA (Certified Quality Improvement Associate). Ia juga memperoleh dua gelar professional dari Registration Accreditation Board USA, yaitu: (1) CMSS (Certified Management Systems Specialist), dan (2) CMSLS (Certified Management System Lead Specialist). Prof. Vincent Gaspersz telah memperoleh sertifikasi IPU (Insinyur Profesional Utama) dari Badan Kejuruan Teknik Industri, Persatuan Insinyur

Indonesia (BKTI-PII) dan AER (Asean Engineer Register #10084) dari Asean Federation of Engineering Organizations (AFEO).

Prof. Vincent Gaspersz adalah Senior Member of the American Society for Quality (Member #: 00749775), International Member of the American Production and Inventory Control Society (Member #: 1023620), and Senior Member of the Institute of Industrial and Systems Engineers (Member #: 880194630).

Prof. Vincent Gaspersz telah berpangalaman lebih dari 27 tahun (sejak 1991) sebagai Designer and Implementer of Integrated Management Systems. Ia telah mempublikasikan 47 buku-buku teks dalam bidang ilmu Ekonomi Manajerial dan Sistem-sistem Manajemen Modern.